

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Jumat, 29 Maret 2019



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Bisnis Indonesia (halaman 7)	Jumat, 29 Maret 2019	Waskita Siap Bangun Asal Ditugaskan	PT Waskita Toll Road menyatakan bahwa perusahaan bersedia membangun jalan tol Pontianak-Singkawang asalkan ditugaskan oleh pemerintah. Direktur Utama PT Waskita Toll Road Herwidiakito mengatakan melalui penugasan, ada jaminan pemerintah untuk pinjaman bank yang relative lebih mudah, terlebih semua pihak sudah mengetahui bagaimana kondisi lalu lintas di luar Jawa, apalagi di Kalimantan.
2	Bisnis Indonesia (halaman 8)	Jumat, 29 Maret 2019	Usulan Daerah Capai 2.000 item	Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menghimpun lebih dari 2.000 usulan rencana pembangunan dari 27 kabupaten atau kota pada 2020. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Jabar Yuke Maulani Septiana mengatakan, pihaknya sedang mengolah 2.000 usulan kabupaten atau kota. Angka ini belum memasukkan usulan dari masyarakat dan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemrov Jabar.
3	Kompas (halaman 6)	Jumat, 29 Maret 2019	Jalur Baru Pembangunan Indonesia	Polemik dalam pembahasan perubahan iklim adalah adanya trade off antara pertumbuhan ekonomi dan penurunan emisi gas rumah kaca (GHG). Padahal, urgensi untuk bertindak terhadap perubahan iklim adalah sekarang. Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 2018 harus jadi peringatan bagi kita semua. Jika perubahan iklim tak ditangani, akan membawa malapetaka bagi dunia dan Indonesia, seperti meningkatkan bencana alam, tenggelamnya pulau pulau Indonesia, kerusakan modal alam, polusi udara, dan kekurangan air. Kelompok paling terdampak adalah masyarakat berpendapatan rendah.
4	Kompas (halaman 16)	Jumat, 29 Maret 2019	Ribuan Pengungsi Krisis Air Bersih	Masyarakat 13 kampung di pinggir Danau Sentani, Kabupaten Jayapura, Ppua, kekurangan air bersih. Kondisi itu mereka alami setelah banjir bandang pada 16 Maret 2019. Hingga Kamis (28/3/2019), 2.217 rumah warga di pinggiran Danau Sentani masih tergenang. Sebanyak 2.746 keluarga terdampak. Luapan air yang menggenangi ribuan rumah itu dipicu tingginya volume air yang masuk ke danau bukan hanya ketika banjir bandang. Sebelum dan sesudahnya, hujan lebat terus mengguyur.

Judul	Waskita Siap Bangun Asal Ditugaskan	Tanggal	Jumat, 29 Maret 2019
Media	Bisnis Indonesia (halaman 7)		
Resume	PT Waskita Toll Road menyatakan bahwa perusahaan bersedia membangun jalan tol Pontianak-Singkawang asalkan ditugaskan oleh pemerintah. Direktur Utama PT Waskita Toll Road Herwidiakito mengatakan melalui penugasan, ada jaminan pemerintah untuk pinjaman bank yang relative lebih mudah, terlebih semua pihak sudah mengetahui bagaimana kondisi lalu lintas di luar Jawa, apalagi di Kalimantan.		

Waskita Siap Bangun Asal Ditugaskan

Bisnis, JAKARTA — PT Waskita Toll Road menyatakan bahwa perusahaan bersedia membangun jalan tol Pontianak—Singkawang asalkan ditugaskan oleh pemerintah.

Rivki Maulana & Krista P. Kinanti
redaksi@bisnis.com

Direktur Utama PT Waskita Toll Road Herwidiakito mengatakan melalui penugasan, ada jaminan pemerintah untuk pinjaman bank yang relatif lebih mudah, terlebih semua pihak sudah mengetahui bagaimana kondisi lalu lintas di luar Jawa, apalagi di Kalimantan.

"Kalau penugasan ya, oke, saja. Kalau enggak penugasan [kami] enggak mau, kan bunuh diri investor ke sana itu kalau IRR [internal rate of return] di bawah 9 atau di bawah 10, relatif kecil," ujarnya kepada *Bisnis*, Kamis (28/3).

Apabila tidak ada penugasan dari pemerintah, katanya, harus ada dukungan kelayakan atau *viability gap fund* (VGF) dari pemerintah. "Namun, kalau tanpa ada VGF pemerintah nonsense. Artinya, pemerintah pasti juga sudah menyiapkan VGF seberapa untuk di sana itu pasti.

► Saat ini, Ditjen Bina Marga sudah menyusun seluruh jaringan jalan di Indonesia, hanya tinggal melakukan penajakan kepada investor.

► Kementerian PUPR masih mematangkan rancangan terowongan pada ruas jalan tol Padang—Pekanbaru untuk mencari desain yang paling efisien.

Enggak mungkin terus tanpa VGF."

Herwidiakito dimintai tanggapannya berkaitan dengan wacana pembangunan jalan tol di Kalimantan Barat tersebut.

Dalam unggahannya di Instagram, Presiden Joko Widodo melalui akun @Jokowi mengatakan bahwa ke depannya, jalan tol dari Pontianak ke Singkawang segera dibangun.

Selain itu, Jembatan Sungai Kambas Besar yang sempat tertunda pengerjaannya akan segera dilanjutkan dan Pelabuhan Internasional Kijing bila telah selesai nanti menjadi pelabuhan terbesar di Kalimantan.

Sementara itu, ketika dimintai tanggapannya terkait dengan rencana Presiden mengenai pembangunan jalan tol Pontianak—Singkawang, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Prikoeso mengatakan bahwa rencana ini belum sampai ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Meskipun begitu, katanya, tidak menutup kemungkinan jalan tol tersebut dibangun.

"[Rencana pembangunan jalan tol Pontianak—Singkawang] belum masuk ke kami ya, itu kan Pak Jokowi sering sekali tes pasar, lempar itu apakah ada respons. Kalau ada respons mungkin kami pertimbangkan untuk menjadi jalan tol atau jalan nasional yang menggunakan *availability payment* itu masih dimungkinkan," ujarnya, Kamis (28/3).

Menurut Danang, saat ini Ditjen Bina Marga sudah menyusun seluruh jaringan jalan di Indonesia, hanya tinggal melakukan penajakan kepada investor.

"Jadi, kan Bina Marga itu sudah menyusun seluruh jaringan jalan nanti akan diputuskan mana yang akan jadi tol mana yang bukan tol. Nah, secara jaringan sudah ada sekarang dari Bina Marga penajakan minat investor untuk bisa melihat apakah tertarik [bangun jalan tol Pontianak—Singkawang]," ujarnya.

Jika wacana pembangunan jalan tol Pontianak—Singkawang mendapat respons badan usaha, jalan tol itu kemungkinan menjadi proyek jalan bebas hambatan kedua di Kalimantan.

Saat ini sedang dibangun jalan tol Balikpapan—Samarinda sepanjang 99,60 kilometer dan rencananya beroperasi mulai tahun ini secara bertahap. Seksi 1 hingga 4A sepanjang 81 kilometer direvisi beroperasi pada April, sedangkan sisanya menyusul pada Juli dan Agustus.

TOL PADANG—PEKANBARU

Sementara itu, Kementerian PUPR masih mematangkan rancangan terowongan pada ruas jalan tol Padang—Pekanbaru untuk mencari desain yang paling efisien. Terowongan di ruas jalan tol ini akan menjadi terowongan terpanjang di Indonesia.

Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Sugiyartanto mengatakan bahwa *detail engineering design* (DED) terowongan

harus dibuat dengan cermat dan harus mengutamakan aspek keselamatan.

Dia berpesan bahwa selain dibangun di tengah hutan pegunungan Bukit Barisan, kawasan tersebut juga berada di jalur sesar Sumatra.

"DED-nya kami godok terus, paralel dengan konsultasi Jepang. Kami harus cari alternatif yang paling murah karena *cost* membangun terowongan itu mahal," ujarnya kepada *Bisnis*, Selasa (28/3).

Sebagai gambaran, di ruas Cileunyi—Sumedang—Dawuan (Cisumdawu), pembangunan terowongan kembar sepanjang 472 meter menghabiskan biaya Rp890 miliar. Sementara itu, di ruas Padang—Pekanbaru, ada lima terowongan yang harus dibangun dengan panjang keseluruhan 17 kilometer. Lokasi terowongan berada di seksi 3 yang menghubungkan Payakumbuh (Sumbar) dengan Pangkalan (Riau) sejauh 43 kilometer.

Sugiyartanto sebelumnya mengatakan bahwa DED terowongan di ruas ini bakal rampung pada pertengahan 2019. Sambal desain terowongan dimatangkan, Kementerian PUPR juga menyiapkan konstruksi seksi 6 dari Pekanbaru ke Bangkinang sepanjang 38 kilometer.

Saat ini, konstruksi ruas tol Padang—Pekanbaru sudah dimulai di seksi 1 (Padang—Sicincin). Secara keseluruhan, panjang ruas tol ini mencapai 255 kilometer dengan kebutuhan investasi pembangunan ditaksir mencapai Rp78 triliun.

Sugiyartanto menyebutkan bahwa seba-

gian pendanaan pembangunan terowongan akan disokong pinjaman dari Jepang. Panjang terowongan yang dibangun Kementerian PUPR sejauh 8,95 kilometer dengan kebutuhan dana US\$420 juta. Pinjaman untuk pembangunan terowongan sudah masuk dalam Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri atau *green book*.

Sementara itu, Danang mengatakan bahwa BPJT sedang melakukan komunikasi dengan Pemerintah Jepang untuk pembangunan terowongan tersebut.

"Kami masih melakukan komunikasi dengan pihak Pemerintah Jepang karena mereka akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan *tunnel*, ada dua *tunnel* yang akan dibangun menembus Bukit Barisan ini," ujarnya, Kamis (28/3).

Menurut Danang, pembangunan jalan tol Trans-Sumatra seperti Padang—Sicincin, Pekanbaru—Sicincin, dan Sicincin—Padang itu masih terus berlangsung.

Pada bagian lain, PT Hutama Karya (Persero) sebagai BUMN yang mendapat penugasan di ruas Padang—Pekanbaru juga direncanakan mendapat pinjaman serupa untuk pembangunan terowongan.

Sebelumnya, Direktur Keuangan Hutama Karya Anis Anjayani mengatakan bahwa pinjaman yang bakal diperoleh direncanakan sebesar Rp7 triliun untuk dua paket.

Paket 1 terdiri atas gerbang 1 ke gerbang 2 Payakumbuh, sedangkan paket 3 mencakup ujung terowongan ke gerbang 3 Pangkalan. ■

 **Ramayana**

PT. RAMAYANA LESTARI SENTOSA TBK

Jl. World Nasyim No. 220 A-B Jakarta 10250
Telp. 3914566, 3151563, 3106653 - Fax. 31934245, 3920484

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2018

(Disajikan dalam Aritan Ringkas, Kecuali Dinyatakan Lain)

31 Desember 31 Desember 31 Desember 31 Desember

Judul	Usulan Daerah Capai 2.000 item	Tanggal	Jumat, 29 Maret 2019
Media	Bisnis Indonesia (halaman 8)		
Resume	Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menghimpun lebih dari 2.000 usulan rencana pembangunan dari 27 kabupaten atau kota pada 2020. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Jabar Yuke Maulani Septiana mengatakan, pihaknya sedang mengolah 2.000 usulan kabupaten atau kota. Angka ini belum memasukkan usulan dari masyarakat dan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemrov Jabar.		

► PEMBANGUNAN JABAR

Usulan Daerah Capai 2.000 Item

Bisnis, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menghimpun lebih dari 2.000 usulan rencana pembangunan dari 27 kabupaten atau kota pada 2020.

Wisnu Wage
redaksi@bisnis.com

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Jabar Yuke Maulani Septiana mengatakan, pihaknya sedang mengolah 2.000 usulan kabupaten atau kota. Angka ini belum memasukkan usulan dari masyarakat dan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Jabar.

"Nilainya secara total belum kita hitung, sekarang yang lagi diolah 2.000 usulan," ungkapnya kepada *Bisnis* di Bandung, Kamis (28/3).

Dari angka ini, dia menargetkan, hanya mengakomodasi satu lokasi satu kegiatan. Pada tahun lalu, sampai Musyawarah Rencana Pembangunan Jabar digelar, Pemprov menerima usulan hingga 30.000 kegiatan. "Itu masuk sistem *e-planning*, tapi yang difilter menjadi APBD untuk bantuan ke kabupaten atau kota itu hanya 2.600 kegiatan," ujarnya.

Menurutnya, angka usulan itu diyakini masih akan bertambah sampai dengan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2020 pada Juni.

Namun, dia memastikan kegiatan yang diprioritaskan untuk diberi bantuan keuangan adalah program yang menunjang kepariwisataan di daerah, seperti penataan alun-alun, hingga akses ke objek wisata. "Alun-alun itu untuk kepariwisataan," ujarnya.

Dia menegaskan bahwa provinsi pun tidak mungkin membiayai seluruhnya ribuan usulan tersebut. Ketika APBD Provinsi tak mampu mendanai, pihaknya akan meneruskan usulan tersebut ke Pemerintah Pusat.

"Kita juga sudah ada mitra CSR Jabar, ada 167 perusahaan dan forum BUMN kita tawarkan, yang tidak terakomodasi APBD kita tawarkan ke swasta," ungkapnya.

Kolaborasi pendanaan dengan swasta

► Angka usulan itu diyakini masih akan bertambah sampai penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2020 pada Juni.

► Dalam forum musrenbang tersebut Pemrov Jabar beserta pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan akan menentukan program dan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2020.

ini diharapkan bisa menopang ketidakmampuan APBD membiayai infrastruktur daerah.

Yuke menunjuk, program jalan mulus hingga ke desa yang digagas Gubernur Jabar Ridwan Kamil dipastikan akan mendorong keterlibatan swasta.

"Jalan sampai ke desa itu target 5 tahun, apakah akan kita biayai oleh provinsi, dengan kabupaten kota atau pihak lain," ujarnya.

Untuk program infrastruktur selama 5 tahun ke depan, dia menegaskan Pemprov Jabar membutuhkan dana sekitar Rp596 triliun. Jika itu menggantungkan pada kocek daerah, paparnya, program tersebut tidak akan tercapai dalam lima tahun.

"Itu baru infrastruktur, belum urusan sosial, kapan tamatnya kalau APBD?" tuturnya.

INVENTARISASI

Sekda Jabar Iwa Karniwa menjelaskan, usulan dari daerah akan bertambah hingga kegiatan pra Musrenbang kewilayahan 2019 yang merupakan satu rangkaian perencanaan dalam menyusun RKPD Provinsi Jawa Barat 2020.

"Lewat forum pra Musrenbang kewilayahan ini diharapkan dapat terinventarisasi

dan terklarifikasi usulan-usulan kegiatan *bottom up*," katanya.

Hasil yang diharapkan pada pra Musrenbang kewilayahan adalah terwujudnya kesepakatan usulan kegiatan dari masing-masing wilayah pengembangan untuk disetujui.

Dalam forum Musrenbang tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat beserta pemerintah daerah kabupaten atau kota dan pemangku kepentingan akan menentukan program dan kegiatan prioritas pembangunan 2020.

Di antaranya dengan memprioritaskan untuk akses pendidikan untuk semua, desentralisasi pelayanan kesehatan, pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi.

"Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata, pendidikan agama dan tempat ibadah, infrastruktur konektivitas wilayah, gerakan membangun desa, subsidi gratis golongan ekonomi lemah (golekmah) dan inovasi pelayanan publik dan penataan daerah," katanya.

Sementara Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Jabar Eddy M. Nasution menilai, skema Pembiayaan Infrastruktur non Anggaran (PINA) masih belum memberikan sumbangsih pada pembangunan di Jawa Barat.

"Untuk Jawa Barat sumbangsinya relatif kecil," ujarnya.

Dia mencontohkan, beberapa implementasi sudah diberikan pengembangan dalam pembangunan infrastruktur kawasan.

"Bekasi bangun jembatan, yang menghubungkan Summarecon itu yang dibangun memakai PINA, jadi ada koneksi dari kawasan Jababeka ke jalan provinsi," katanya.

Contoh lain, sumbangsih Summarecon di kawasan Gedebage yang turut membuka akses dari Tol Cileunyi ke kawasan mereka. "Dia bangun jalan lingkaran, ini bagian dari tol BIUTR. Harusnya [skema] ini yang kita dorong, tapi kalau bicara persen [sumbangsih], persennya kecil," ujarnya.

Eddy menilai, ke depan para pengembang memang harus didorong untuk turut membangun jalan di kawasan atau pemukiman.

Daerah lain sudah memulai ini dengan agresif. "Kalau kita memang agak terlambat," katanya. (157) 

Judul	Jalur Baru Pembangunan Indonesia	Tanggal	Jumat, 29 Maret 2019
Media	Kompas (halaman 6)		
Resume	Polemik dalam pembahasan perubahan iklim adalah adanya trade off antara pertumbuhan ekonomi dan penurunan emisi gas rumah kaca (GHG). Padahal, urgensi untuk bertindak terhadap perubahan iklim adalah sekarang. Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 2018 harus jadi peringatan bagi kita semua. Jika perubahan iklim tak ditangani, akan membawa malapetaka bagi dunia dan Indonesia, seperti meningkatkan bencana alam, tenggelamnya pulau-pulau Indonesia, kerusakan modal alam, polusi udara, dan kekurangan air. Kelompok paling terdampak adalah masyarakat berpendapatan rendah.		

Jalur Baru Pembangunan Indonesia

Mari Elka Pangestu

Guru Besar FEB Universitas Indonesia

Polemik dalam pembahasan perubahan iklim adalah adanya *trade off* antara pertumbuhan ekonomi dan penurunan emisi gas rumah kaca (GHG). Padahal, urgensi untuk bertindak terhadap perubahan iklim adalah sekarang.

Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 2018 harus jadi peringatan bagi kita semua. Jika perubahan iklim tak ditangani, akan membawa malapetaka bagi dunia dan Indonesia, seperti meningkatnya bencana alam, tenggelamnya pulau-pulau Indonesia, kerusakan modal alam, polusi udara, dan kekurangan air. Kelompok paling terdampak adalah masyarakat berpendapatan rendah.

Kementerian PPN/Bappenas baru saja meluncurkan laporan berjudul "Pembangunan Rendah Karbon-Pergeseran Paradigma Menuju Ekonomi Hijau di Indonesia" yang menjadikan Indonesia negara pertama yang mengintegrasikan target penurunan emisi GHG dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Dengan pendekatan sistem yang terintegrasi (*systems based integrated approach*), jalur rendah karbon dapat dicapai dengan intervensi kebijakan terhadap sistem yang saling terkait antara sistem energi, transportasi, industri, pertanian dan perikanan, serta sektor lain. Pendekatan sistem mengintegrasikan dampak kegiatan ekonomi dengan daya tampung dan daya dukung seperti sumber daya lahan dan air serta dampak emisi GHG. Dengan demikian, seharusnya akan mengubah proses dalam perencanaan dan implementasi kebijakan yang ego-sektoral atau "silo".

Berdasarkan laporan itu, pembangunan rendah karbon akan menghasilkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih

tinggi daripada pendekatan pembangunan saat ini (*business as usual*). Perekonomian diprediksi tumbuh rata-rata 6 persen per tahun pada 2019-2045.

Emisi GHG diproyeksikan turun sampai hampir 43 persen pada 2030 atau di atas komitmen perubahan iklim Indonesia. Jalur pembangunan rendah karbon mengandung asumsi perubahan kebijakan pemerintah, seperti kebijakan beralih dari sumber energi berbasis minyak bumi dan batubara ke sumber energi rendah karbon. Contoh lain, pembangunan infrastruktur dilakukan dengan berkelanjutan, seperti membangun sistem transportasi publik ramah lingkungan dan kebijakan peningkatan produksi pertanian dengan tak memperluas lahan, tetapi menaikkan produktivitas.

Tentu syarat sangat penting untuk merealisasikan pertumbuhan tinggi sekaligus rendah karbon adalah komitmen dan koordinasi pemerintah, termasuk dengan pemda, dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Kepastian arah dan strategi akan mendorong investasi serta inovasi. Selain kinerja pertumbuhan PDB lebih tinggi dari jalur pembangunan rendah karbon, manfaat lain yang dapat dicapai mencakup kesempatan kerja lebih luas, kualitas kesehatan publik membaik, dan taraf hidup masyarakat meningkat. Bahkan, pada 2045, kemiskinan ekstrem diperkirakan akan turun hingga 4,2 persen dari penduduk, dari 9,8 persen saat ini.

Sinergi

Dalam rangka mendorong investasi dan pendanaan ekonomi rendah karbon di Indonesia agar menarik dan bermanfaat, tiga hal ini patut diperhatikan. Pertama, pembangunan rendah karbon harus mendukung pendekatan sinergis yang menyum-

bang pada pencapaian sasaran ekonomi, sosial, dan lingkungan secara bersamaan. Contohnya, kebijakan melindungi serta rehabilitasi hutan dan lahan, seperti moratorium penggunaan lahan gambut dan menahan deforestasi, juga akan berdampak pada pasokan air untuk minum dan irigasi yang dihasilkan ekosistem hutan dan sungai.

Energi terbarukan juga mengurangi emisi GHG dan mendorong tercapainya target kesehatan, seperti menurunkan kasus infeksi pernapasan yang dipicu polusi dari pembangkit tenaga batubara. Menurut laporan itu, investasi di proyek baru batubara tak lagi ekonomis jika dampak polusi ikut dihitung. Investasi energi terbarukan lebih baik bagi ekonomi dan masyarakat, saat ini dan di masa datang. Apalagi, biaya energi terbarukan turun dengan cepat dan terus turun dengan tercapainya skala ekonomi.

Skala investasi dan pembiayaan

Kedua, dalam laporan itu, rata-rata total investasi untuk pembangunan rendah karbon di Indonesia sekitar 21,9 miliar dollar AS untuk periode RPJMN 2020-2024. Ini setara dengan 1,7 persen PDB. Sementara investasi untuk pembangunan rendah karbon 2024-2045 diperkirakan sekitar 2,3 persen PDB. Dibandingkan dengan tingkat investasi saat ini, pembangunan rendah karbon perlu rasio investasi terhadap PDB lebih rendah atau lebih efisien.

Skenario pembangunan rendah karbon diproyeksi mampu menciptakan 15,3 juta *green jobs* dengan tingkat upah lebih baik pada 2045. Ini kabar baik bagi kita semua, khususnya mengingat bonus demografi dan kebutuhan penciptaan lapangan kerja. Kebijakan dan intervensi juga harus bersandar pada tena-

ga kerja lokal dan menekan jumlah masyarakat yang terdampak negatif saat transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Mobilisasi pendanaan

Ketiga, mengingat jumlah investasi yang diperlukan, pembangunan rendah karbon butuh kemitraan antara sektor publik dan swasta dalam mobilisasi pendanaan dan harmonisasi investasi dengan tolok ukur rendah karbon. Pemerintah tak punya sumber dari APBN yang cukup untuk mendanai transisi ke jalur pembangunan rendah karbon, baik dari upaya sendiri maupun dukungan mitra pembangunan bilateral/multilateral.

Perlu pendanaan tambahan dari swasta domestik serta luar negeri dan pendanaan campuran (*blended finance*), khususnya untuk investasi di *sustainable capital* yang akan menyokong transisi ini. Daya tarik bagi swasta dapat diciptakan dengan mengarusutakan kebijakan rendah karbon, selain membangun kerangka tata kelola serta kebijakan ajek dan jelas. Pemerintah sudah memulai upaya ini dengan memberikan label proyek *green* dalam APBN, diterbitkannya SDG One Fund oleh PT SMI. Otoritas Jasa Keuangan juga mengeluarkan pedoman pendanaan berkelanjutan (*sustainable finance*).

Tantangan terbesar dalam mendorong investasi swasta datang dari persepsi tentang risiko investasi. Bank pembangunan dan institusi keuangan dapat berperan sebagai katalis dalam mobilisasi pendanaan awal (*upfront financing*) atau memberi garansi yang dibutuhkan. Ini jadi perangsang untuk mengurangi risiko investasi di proyek-proyek rendah karbon. Tersedianya fasilitas untuk persiapan proyek menjadi satu cara mendukung pengembangan proyek-proyek yang *bankable* sekaligus sepadan de-

ngan strategi rendah karbon. Contohnya kemitraan Clean Energy Finance antara AS dan India (USICEF) yang membantu proyek energi bersih agar siap untuk investasi.

Berbeda dengan anggapan umum selama ini, pendekatan berbasis sistem yang terintegrasi membuktikan *trade off* tak mesti terjadi saat kita berniat menggapai sasaran pembangunan dan sasaran rendah karbon sekaligus. Kini tugas kita semua untuk mewujudkan visi dan peluang emas agar Indonesia tak kehilangan ribuan pulau dan anak-cucu kita bisa menghirup udara segar serta hidup nyaman.

POJOK

Perlu upaya total untuk atasi hoaks. Supply and demand-nya tinggi.

Integrasi tarif MRT dan moda lain mutlak diperlukan. Jauh dekat goceng!

Pemerintah diminta naikkan tarif cukai rokok. Duitnya buat nombokin BPJS.

Farmasi Indonesia masih tergantung impor. Jamu... jamuu...

Mang Uiril

Judul	Ribuan Pengungsi Krisis Air Bersih	Tanggal	Jumat, 29 Maret 2019
Media	Kompas (halaman 16)		
Resume	Masyarakat 13 kampung di pinggir Danau Sentani, Kabupaten Jayapura, Ppua, kekurangan air bersih. Kondisi itu mereka alami setelah banjir bandang pada 16 Maret 2019. Hingga Kamis (28/3/2019), 2.217 rumah warga di pinggiran Danau Sentani masih tergenang. Sebanyak 2.746 keluarga terdampak. Luapan air yang menggenangi ribuan rumah itu dipicu tingginya volume air yang masuk ke danau bukan hanya ketika banjir bandang. Sebelum dan sesudahnya, hujan lebat terus mengguyur.		

BANJIR SENTANI

Ribuan Pengungsi Krisis Air Bersih

JAYAPURA, KOMPAS — Masyarakat 13 kampung di pinggir Danau Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, kekurangan air bersih. Kondisi itu mereka alami setelah banjir bandang pada 16 Maret 2019.

Hingga Kamis (28/3/2019), 2.217 rumah warga di pinggiran Danau Sentani masih tergenang. Sebanyak 2.746 keluarga terdampak.

Luapan air yang menggenangi ribuan rumah itu dipicu tingginya volume air yang masuk ke danau bukan hanya ketika banjir bandang. Sebelum dan sesudahnya, hujan lebat terus mengguyur.

Berdasarkan pantauan di Kampung Ayapo, Kamis pukul 11.00 WIT, tinggi air yang menggenangi puluhan rumah mencapai 60 sentimeter. Warga mengungsi ke gereja, balai desa, dan sekolah.

Obaja Pulalo (50), tokoh masyarakat di Kampung Ayapo, mengatakan, 200 keluarga terendam. "Pasokan air bersih masih terbatas. Warga terpaksa mengonsumsi air danau selama 10 hari sebelum mendapatkan bantuan air mineral dari pemda. Banyak warga diare dan kulit gatal-gatal," katanya.

Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua Yulianus Mam-

brasar menuturkan, diperkirakan ada sumbatan di muara Danau Sentani akibat endapan lumpur.

"Tak ada sampah atau kayu di muara tersebut. Kami akan berkoordinasi dengan Pemda Jayapura dan masyarakat untuk penanganan masalah sedimen itu," katanya.

Terkait krisis air bersih, BWS menyalurkan air bersih ke kampung-kampung itu pada Kamis kemarin. Air danau tercemar limbah rumah tangga dan bangkai hewan.

Dalam waktu dekat, BWS Papua akan membuat bangunan penampung air (*intake*) di lo-

kasi terdampak banjir. "Kami akan membuat tiga hingga empat *intake* untuk menyuplai air ke kampung-kampung tersebut. Sebelumnya, kami telah membangun tiga *intake* untuk pengungsi banjir bandang di Sentani," tambahnya.

Kepala Dinas Kesehatan Papua Aloysius Giay ketika dikonfirmasi mengatakan, diare dan penyakit kulit rentan diderita pengungsi. Karena itu, bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, pihaknya menerjunkan petugas ke seluruh pengungsian. Mereka memberi pengobatan berbagai penyakit. (FLO)